

KATALOG BPS : 7103005.36

Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2008-2010



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROPINSI BANTEN**

**STATISTIK KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
Financial Statistic of Regency/Municipality Government
PROVINSI BANTEN
2008 – 2010**

<http://banten.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BANTEN

DAFTAR ISI/CONTENS

	Halaman Page
KATA PENGANTAR/PREFACE	iv
DAFTAR ISI/CONTENS	v
PENJELASAN UMUM/GENERAL EXPLANATION	1
ULASAN RINGKAS/BRIEF DESCRIPTION	12

Tabel
Table

1	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemda Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Banten Menurut Kabupaten/Kota / <i>Actual Income and Expenditure Of Regency/Municipality Government Throughout Province Banten By Regency/Municipality</i>	23
2.1	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Banten/ <i>Actual Receipt of Regency/Municipality Government Provincial of Banten</i>	24
2.2	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Banten/ <i>Actual Expenditure of Regency/Municipality Government Provincial of Banten</i>	25
2.1.1	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang/ <i>Actual Receipt Government of Regency Pandeglang</i>	26
2.2.1	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang/ <i>Actual Expenditure Government of Regency Pandeglang</i>	27
2.1.2	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak/ <i>Actual Receipt Government of Regency Lebak</i>	28
2.2.2.	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak/ <i>Actual Expenditure Government of Regency Lebak</i>	29
2.1.3	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang/ <i>Actual Receipt Government of Regency Tangerang</i>	30
2.2.3	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang/ <i>Actual Expenditure Government of Regency Tangerang</i>	31
2.1.4	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang/ <i>Actual Receipt Government of Regency Serang</i>	32

2.2.4	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Serang/ <i>Actual Expenditure Government of Regency Serang</i>	33
2.1.5	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kota Tangerang/ <i>Actual Receipt Government of Municipality Tangerang</i>	34
2.2.5	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kota Tangerang/ <i>Actual Expenditure Government of Municipality Tangerang.....</i>	35
2.1.6	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kota Cilegon/ <i>Actual Receipt Government of Municipality Cilegon</i>	36
2.2.6	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kota Cilegon/ <i>Actual Expenditure Government of Municipality Cilegon.....</i>	37
2.1.7	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kota Serang/ <i>Actual Receipt Government of Municipality Serang</i>	38
2.2.7	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kota Serang/ <i>Actual Expenditure Government of Municipality Serang</i>	39
2.1.8	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan/ <i>Actual Receipt Government of Municipality Tangerang Selatan</i>	40
2.2.8	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan/ <i>Actual Expenditure Government of Municipality Tangerang Selatan.....</i>	41

I. PENJELASAN UMUM

I.1. Pendahuluan

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diterbitkan Badan Pusat Statistik Provinsi Banten secara rutin setiap tahun. Publikasi tahun ini menyajikan data realisasi pendapatan dan belanja pemerintah daerah kabupaten/kota seluruh Provinsi Banten tahun anggaran 2008, 2009 dan 2010. Publikasi ini disajikan untuk memenuhi kebutuhan terhadap data keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota terutama untuk melihat potensi daerah dari sisi penerimaan dan pengeluaran yang bisa dipakai untuk membuat kebijakan yang rinci dan tepat sasaran.

I.2. Ruang Lingkup Survei

Data realisasi pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dikumpulkan dari Bagian Keuangan Kantor Bupati/Walikota Kepala Daerah Kabupaten/Kota di tiap-tiap kabupaten/kota seluruh Provinsi Banten.

I.3. Konsep dan Definisi

Daftar isian realisasi keuangan daerah kabupaten/kota (K-2) digunakan untuk mencatat data statistik keuangan menyangkut realisasi penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam daftar isian tersebut terdapat beberapa konsep dan definisi yang terkait dengan struktur laporan keuangan kabupaten/kota yang sudah baku. Berikut ini beberapa penjelasan konsep dan definisi dalam daftar isian K-2.

I.3.1. Penerimaan Daerah

Penerimaan daerah dalam struktur laporan keuangan kabupaten/kota, secara umum terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan.

Pendapatan Daerah bersumber dari :

1. Pendapatan asli daerah
2. Dana perimbangan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak Daerah

Adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Penerimaan pajak daerah antara lain pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, galian gol C, parkir dan lain-lain.

1.2. Retribusi Daerah

Adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum meliputi retribusi pelayanan kesehatan, persampahan/kebersihan, biaya KTP dan akte catatan sipil, pelayanan pemakaman, pelayanan parkir tepi jalan umum, pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, penggantian biaya cetak peta dan retribusi pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir/pertokoan, terminal, rumah potong hewan, tempat rekreasi/olahraga dan sejenisnya. Retribusi perizinan tertentu meliputi retribusi izin mendirikan bangunan, izin peruntukan penggunaan tanah, izin trayek dan lain-lain.

1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan yang berupa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal/investasi pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal/investasi pada perusahaan milik pemerintah/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi pada perusahaan milik swasta.

1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TGR), komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran / cicilan penjualan, dan lain-lain.

2. Dana Perimbangan

Adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak/bukan pajak, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK).

2.1. Bagi Hasil Pajak

Bagi hasil pajak adalah bagian daerah yang berasal dari pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB), pendapatan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Dalam Negeri, dan PPh Pasal 21 orang pribadi (termasuk PPh pasal 21), dan lain-lain.

2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak

Pendapatan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam berasal dari pendapatan iuran hak pengusahaan hutan (IHPH), provisi sumber daya alam kehutanan, dana reboisasi, pungutan penguasaan perikanan dan hasil perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

2.3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

2.4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi khusus (DAK) adalah dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus DAU.
- Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional.
- Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil.

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah digariskan.

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari

pendapatan hibah, dana darurat, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

1.3.2. Belanja Daerah

Belanja daerah terdiri dari :

1. Belanja tak langsung.
2. Belanja langsung.

1. Belanja Tak Langsung

Adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja tak langsung terdiri dari: belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan undang-undang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan, serta belanja tak terduga.

Belanja Pegawai

Adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Termasuk di sini uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

Belanja Bunga

Adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung berdasarkan kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Belanja Subsidi

Adalah belanja yang telah dianggarkan dan digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu, agar harga jual produksi barang / jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Tentunya perusahaan/lembaga tersebut menghasilkan produk atau jasa untuk pelayanan masyarakat umum.

Belanja Hibah

Adalah belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, perusahaan daerah / BUMN / BUMD, badan / lembaga / organisasi swasta, ataupun kelompok masyarakat/perorangan.

Belanja Bantuan Sosial

Adalah belanja yang telah dianggarkan untuk memberikan bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, partai politik dan yang lainnya bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Adalah belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan kabupaten/kota kepada provinsi, kabupaten/kota, kepada desa, atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja bagi hasil ini terdiri dari :

- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah provinsi.

- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten / kota.
- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa.
- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah kabupaten/kota.
- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa

Adalah pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa, atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah / pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.

Bantuan keuangan ini terdiri dari :

- Bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi.
- Bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota.
- Bantuan keuangan kepada pemerintah desa.
- Bantuan keuangan kepada pemerintah daerah/ pemerintah desa lainnya.

Belanja Tidak Terduga

Adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2. Belanja Langsung

Adalah bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah daerah.

Belanja Pegawai

Adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja Barang dan Jasa

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Pembelian/pengadaan barang dan jasa yang dimaksud meliputi bahan pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atribut, pakaian kerja, pakaian khusus hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan pindah tugas, pemulangan pegawai dan lain-lain belanja barang dan jasa.

Belanja Modal

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian

pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Pembentukan asset tersebut meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, mebeulair, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, bangunan, buku/kepuustakaan, barang seni, pengadaan hewan ternak dan tanaman, serta persenjataan/keamanan.

Pembiayaan daerah terdiri dari :

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

Adalah bagian penerimaan anggaran yang didapat dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

1.2 Pencairan Dana Cadangan

Adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Adalah semua penjualan asset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan oleh pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah

Adalah semua penerimaan dari pinjaman daerah, termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Adalah semua penerimaan kembali dari pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat, provinsi dan/atau pemerintah daerah lainnya.

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

2.1 Pembentukan Dana Cadangan

Adalah pengeluaran untuk membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus / sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Adalah pengeluaran daerah yang dialokasikan pada penyertaan modal / investasi pemerintah daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, permanen atau non permanen. Investasi ini dapat berupa deposito berjangka, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Saham, penanaman modal pada BUMN / BUMD, pembelian obligasi dan surat utang jangka panjang.

2.3. Pembayaran Pokok Utang

Adalah pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

2.4. Pemberian Pinjaman Daerah

Adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk pemberian kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau pihak ketiga.

3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Pos ini merupakan hasil penjumlahan antara surplus atau defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Surplus atau defisit anggaran merupakan selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah, serta antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

<http://banten.bps.go.id>

II. ULASAN RINGKAS

II.1. Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2008, 2009 dan 2010 merupakan langkah kongkrit pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Kebijakan tersebut harus mencerminkan langkah pemerintah daerah dalam penanganan pasca krisis dan pengaruh ekonomi global yang semakin dirasakan dampaknya. Pemerintah daerah dituntut menjadi motor utama dalam menggerakkan perekonomian yang lesu di daerahnya masing-masing agar dapat kembali ke posisi sebelum krisis. Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten pada tahun 2010 berdasarkan perhitungan Produk Domestik Bruto yaitu 5.94 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2008 yaitu sebesar 5.77 persen dan tahun 2009 sebesar 4.69 persen, maka pertumbuhan ekonomi mengalami sedikit percepatan walaupun pada tahun 2009 mengalami perlambatan. Namun demikian laju pertumbuhan ekonomi provinsi tidak berarti terhadap kualitas dan kuantitas pelayanan publik di daerah karena tidak ada imbas secara langsung laju pertumbuhan ekonomi provinsi terhadap APBD. Secara empiris dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi bisa berfluktuasi naik dan turun sedangkan APBD cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus melihat secara cermat belanja publiknya sehingga tepat sasaran.

Kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang semakin meningkat mendorong pemerintah daerah untuk menaikkan belanja pemerintah. Untuk mengimbangnya, pemerintah mengupayakan peningkatan penerimaan daerah dengan memberi perhatian kepada pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber PAD adalah hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. PAD harus dapat dikelola daerah agar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah sehingga dalam upaya penggalan sumber pendapatannya pemerintah tidak mendistorsi perekonomian. Otonomi daerah dalam bentuk desentralisasi fiskal yang memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah mengatur keuangan daerahnya harus dimanfaatkan dalam konteks memberikan

pelayanan yang lebih baik, bukan dengan pembebanan pajak yang semakin meningkat yang bisa memperlambat laju pertumbuhan ekonomi.

Sumber penerimaan yang masih menjadi sumber utama daerah untuk membiayai belanja daerah adalah dana alokasi umum (DAU). Dana transfer pemerintah pusat ini memiliki kontribusi terbesar dalam pendapatan daerah. Sumber keuangan dari Pemerintah Daerah yang lain adalah bagi hasil pajak dan bukan pajak, bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi, serta lain-lain pendapatan yang sah.

Penerimaan daerah sesuai dengan struktur laporan keuangan terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Penerimaan daerah dalam realisasi tahun 2009 dan 2010 mengalami peningkatan, jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan daerah tahun 2008, dari 6.122,96 miliar pada tahun 2008 menjadi 7.866,06 miliar pada tahun 2009 atau naik 28,47 persen, dan pada tahun 2010 menjadi 9.393,90 miliar atau naik 19,42 persen dari tahun 2009. Dari sisi pendapatan daerah, terlihat adanya peningkatan sebesar 18,30 persen, yaitu dari 5.711,35 miliar rupiah pada tahun 2008 meningkat menjadi 6.756,71 miliar rupiah pada tahun 2009, dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 7.940,10 miliar rupiah atau naik 17,51 persen dari tahun 2009. Peningkatan pendapatan daerah secara agregat sebesar 1.045,36 miliar rupiah pada tahun 2009 dan 1.183,39 miliar rupiah pada tahun 2010 masih banyak dipengaruhi oleh kenaikan transfer pusat ke daerah dalam bentuk dana perimbangan. Secara empiris, dapat ditunjukkan kenaikan transfer sebesar 645,96 miliar rupiah pada tahun 2009 dan 716,41 miliar rupiah pada tahun 2010. Sedangkan kenaikan pendapatan asli daerah belum secara signifikan menunjang kenaikan penerimaan pemerintah daerah walaupun kenaikannya cukup signifikan yaitu 26,12 persen pada tahun 2009 dan 18,75 persen pada tahun 2010.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, sejak tahun 2001 transfer dana dari APBN ke daerah dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan. Sebelumnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam APBN diwujudkan melalui alokasi pengeluaran transfer ke daerah berupa subsidi daerah otonom (SDO) dan anggaran bantuan pembangunan pusat dalam bentuk inpres. Dana perimbangan dari pemerintah pusat mengalami kenaikan dari 4.314,63 miliar

rupiah pada tahun 2008 menjadi 4.960,59 miliar rupiah pada tahun 2009 dan 5.677,00 miliar rupiah pada tahun 2010. Dana perimbangan yang ditransfer dari pemerintah pusat cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini merupakan dampak pemekaran yang memerlukan dana operasional untuk prasarana pembangunan dan di sisi lain daerah induk dana perimbangannya tidak mengalami penurunan yang berarti.

Pada tahun 2009 terjadi kenaikan dari tahun 2008 yaitu pada belanja langsung sebesar 8,85 persen dan belanja tidak langsung sebesar 12,67 persen, dan pada tahun 2010 terjadi kenaikan dari tahun 2009 yaitu pada belanja langsung sebesar 5,02 persen dan belanja tidak langsung sebesar 34,30 persen.

Tabel a
Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Se Provinsi Banten
2008 – 2010
(ribu rupiah / thousand rupiahs)

Rincian	2008	2009	2010	Perubahan 2008-2009 (persen)	Perubahan 2009-2010 (persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. PENERIMAAN DAERAH	6,122,959,235	7,866,057,791	9,393,899,743	28.47	19.42
Pendapatan Daerah	5,711,351,202	6,756,714,313	7,940,097,355	18.30	17.51
1. Pendapatan Asli Daerah	753,901,856	950,804,139	1,129,058,864	26.12	18.75
2. Dana Perimbangan	4,314,627,161	4,960,591,218	5,677,001,123	14.97	14.44
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	642,822,185	845,318,956	1,134,037,368	31.50	34.15
Pembiayaan Daerah	411,608,033	1,109,343,478	1,453,802,388	169.51	31.05
B. PENGELUARAN DAERAH	6,122,959,235	7,866,057,791	9,393,899,743	28.47	19.42
Belanja Tidak Tangsung	2,917,172,096	3,286,770,753	4,413,996,187	12.67	34.30
1. Belanja Pegawai	2,466,129,271	2,853,639,096	3,796,418,021	15.71	33.04
2. Belanja Bunga	32,616,601	20,036,624	3,399,026	-38.57	-83.04
3. Belanja Subsidi	-	2,832,222	4,365,060	-	54.12
4. Belanja Hibah	66,037,000	169,365,870	317,479,496	156.47	87.45
5. Belanja Bantuan Sosial	204,188,224	161,668,756	102,941,336	-20.82	-36.33
6. Belanja Bagi Hasil	28,000,000	-	16,234,721	-100	-
7. Belanja Bantuan Keuangan	106,311,000	69,367,373	81,334,175	-34.75	17.25
8. Pengeluaran Tidak Terduga	13,890,000	9,860,812	91,824,352	-29.01	831.20
Belanja Langsung	3,017,975,747	3,285,213,689	3,450,252,873	8.85	5.02
1. Belanja Pegawai	642,715,758	620,922,048	646,581,676	-3.39	4.13
2. Belanja Barang dan Jasa	974,920,488	1,086,205,464	1,287,866,479	11.41	18.57
3. Belanja Modal	1,400,339,501	1,578,086,177	1,515,804,718	12.69	-3.95
Pembiayaan Daerah	187,811,392	1,294,073,349	1,529,650,683	589.03	18.20

II.2. Penerimaan Daerah

Berbagai cara dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pendapatannya dalam upaya pemenuhan pembiayaan pelayanan publiknya. *Pertama*, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memperoleh dana dari sumber-sumber yang dikategorikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Kedua*, memperoleh transfer dana dari APBN yang dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan, ini selain ditujukan untuk memberikan kepastian sumber pendanaan bagi APBD, juga bertujuan untuk mengurangi/memperkecil perbedaan kapasitas fiskal antar daerah. *Ketiga*, daerah memperoleh penerimaan dari sumber lainnya seperti bantuan dana kontijensi dan bantuan dana darurat. *Keempat*, menerima pinjaman dari dalam dan luar negeri.

Jika dilihat dari pendapatan daerah, tampak bahwa realisasi pendapatan 2009 meningkat dari realisasi pendapatan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tahun 2008, demikian juga realisasi pendapatan 2010 meningkat dari realisasi pendapatan 2009.

II.2.1. Pendapatan Daerah

II.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber penerimaan yang harus dioptimalkan peranannya agar mampu memberikan kompensasi kepada masyarakat berupa pelayanan yang baik dan perbaikan fasilitas umum. Jumlah dan kenaikan kontribusi PAD yang memadai akan menentukan tingkat kemandirian kabupaten/kota dalam pembangunan daerahnya sehingga tidak selalu tergantung kepada bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi. Salah satu langkah yang bisa ditempuh pemerintah daerah adalah memberikan kemudahan dalam investasi bagi sektor swasta sehingga akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh tumbuhnya sektor swasta.

Tabel b
Distribusi Persentase Realisasi Penerimaan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se Provinsi Banten
Menurut Jenis Penerimaan
2008 - 2010

Jenis Penerimaan	2008	2009	2010
(1)	(3)	(4)	(5)
PENERIMAAN	100.00	100.00	100.00
Pendapatan Daerah	93.28	85.90	84.52
1. Pendapatan Asli Daerah	12.31	12.09	12.02
1.1 Pajak daerah	5.54	5.48	5.50
2.2 Retribusi Daerah	3.59	2.90	2.92
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0.54	0.60	0.80
1.4 Lain-lain PAD yang sah	2.65	3.10	2.80
2. Dana Perimbangan	70.47	63.06	60.43
2.1 Bagi Hasil Pajak	12.49	13.65	14.01
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	0.04	0.04	0.06
2.3 Dana Alokasi Umum	53.60	45.47	42.48
2.4 Dana Alokasi Khusus	4.33	3.91	3.88
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	10.50	10.75	12.07
Pembiayaan Daerah	6.72	14.10	15.48

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2009 terhadap total penerimaan daerah mengalami penurunan dibanding tahun 2008 yaitu dari 12,31 persen menjadi 12,09 persen dan 12,02 persen pada tahun 2010. Namun jika dilihat dari nilai nominalnya PAD mengalami peningkatan yaitu dari 753,90 miliar rupiah pada tahun 2008 menjadi 950,80 miliar rupiah pada tahun 2009 atau naik sebesar 26,12 persen, demikian juga pada tahun 2010 menjadi 1.129,06 miliar rupiah atau naik 18,75 dari tahun 2009. Sumber utama PAD adalah pajak daerah dan retribusi daerah, dengan kontribusinya masing-masing sebesar 5,48 persen dan 2,90 persen terhadap total penerimaan pada tahun 2009, dan 5,50 persen dan 2,92 persen terhadap total penerimaan pada tahun 2010. Selain itu, pendapatan lain-lain menyumbang kontribusi sebesar 3,70 persen pada tahun 2009 dan 3,60 pada tahun 2010. Komposisi ini tidak berbeda jauh dengan tahun 2008.

II.2.1.2. Dana Perimbangan

Dari tabel b dapat dilihat bahwa penerimaan pemerintah daerah kabupaten/kota kontribusi terbesarnya disumbang dari dana perimbangan, dimana realisasi 2009 kontribusinya sebesar 63,06 persen tahun 2010 sebesar 60,43 persen dari total penerimaan. Komponen terbesarnya adalah DAU yaitu sebesar 45,47 persen dengan nilai nominal sebesar sebesar 3.576,46 miliar rupiah pada tahun 2009, dan pada tahun 2010 sebesar 42,48 persen dengan nilai nominal 3.990,69 miliar rupiah. Besarnya DAU yang ditransfer ke daerah tersebut merupakan upaya pemerintah mengurangi atau memperkecil kesenjangan fiskal antar daerah yang selama ini masih terjadi. Besarnya DAU yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ditetapkan sekurang-kurangnya 25 persen dari penerimaan dalam negeri bersih setelah dikurangi dengan dana bagi hasil dan DAK. Komponen berikutnya yang memberikan sumbangan terbesar kedua setelah DAU adalah bagi hasil pajak yaitu sebesar 13,65 persen dengan nilai sebesar 1.073,42 miliar rupiah pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 sebesar 14,01 persen dengan nilai sebesar 1.315,90 miliar rupiah. Secara persentase terhadap total penerimaan, kontribusi DAU dari tahun 2008 hingga 2010 menurun, namun nilai nominalnya meningkat. Sementara bagi hasil pajak mengalami kenaikan baik persentase maupun nilai nominalnya. Kontribusi terkecil yang termasuk dalam dana perimbangan adalah bagi hasil non pajak yaitu sebesar 0,04 persen pada tahun 2009 dan 0.06 persen untuk tahun 2010.

II.2.1.3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Penerimaan lain-lain pendapatan yang sah mengalami peningkatan dari 642,82 miliar pada tahun 2008 menjadi 845,32 miliar rupiah pada tahun 2009 atau naik sebesar 31,50 persen, dan pada tahun 2010 menjadi 1.134,04 miliar atau naik dari tahun 2009 sebesar 34,15 persen. Peningkatan pendapatan ini menaikkan kontribusinya terhadap penerimaan dari 10,50 persen tahun 2008 menjadi 10,75

persen pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 menjadi 12,07 persen. Penerimaan lainnya terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana penyesuaian dan otonomi khusus yang merupakan dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa dan/atau *crisis solvability* ditambah bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

II.2.2. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan, penerimaan pinjaman dan obligasi, dan hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Penerimaan pembiayaan daerah pada realisasi 2009 dan 2010 mengalami peningkatan dibandingkan pada realisasi 2008 yaitu sebesar 411,61 miliar rupiah pada tahun 2008 menjadi 1.109,34 miliar rupiah pada tahun 2009 atau naik 169,51 persen, dan pada tahun 2010 menjadi 1.453,80 miliar rupiah atau naik sebesar 31,05 persen. Dengan peningkatan secara nominal pada tahun 2009 dan 2010, maka kontribusi pembiayaan terhadap penerimaan juga mengalami peningkatan dari 6,72 persen pada tahun 2008 menjadi 14,10 persen pada tahun 2009, dan pada tahun 2010 menjadi 15,48 persen.

II.3. Pengeluaran Daerah

Pengeluaran daerah terdiri dari belanja tak langsung, belanja langsung dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Belanja tak langsung meliputi bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja tak langsung terdiri dari: belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan undang-undang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan, serta belanja tak tersangka. Sedangkan belanja langsung meliputi belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal melaksanakan program dan

kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah daerah.

Seperti halnya total penerimaan daerah pada realisasi 2009 dan 2010, total pengeluaran juga mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2009 naik sebesar 28,47 persen dibanding tahun 2008, dan pada tahun 2010 naik sebesar 19,42 persen dibanding tahun 2009. Hal ini disebabkan oleh peningkatan belanja tak langsung yang meningkat dari 2.917,17 miliar rupiah pada tahun 2008 menjadi 3.286,77 miliar rupiah pada tahun 2009 atau naik sebesar 12,67 persen dan pada tahun 2010 menjadi 4.414,00 miliar rupiah atau naik 34,30 persen dari tahun 2009. Begitu juga belanja langsung meningkat dari 3.017,98 miliar rupiah pada tahun 2008 menjadi 3.285,21 miliar rupiah pada tahun 2009 atau naik sebesar 8,85 persen, dan pada tahun 2010 menjadi 3.450,25 miliar atau naik 5,02 persen dari tahun 2009. Pada pembiayaan daerah juga mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 589,03 persen yaitu dari 187,81 miliar rupiah pada tahun 2008 menjadi 1.294,07 miliar rupiah pada tahun 2009, dan pada tahun 2010 menjadi 1.529,65 miliar rupiah naik 18,20 persen dari tahun 2009. Peningkatan yang drastis terjadi pada realisasi tahun 2009 terhadap tahun 2008, karena pada tahun 2009 mengalami penurunan pengeluaran pada beberapa pos belanja, baik pada belanja tak langsung maupun pada belanja langsung, sehingga pada realisasi tahun 2009 mengalami sisa lebih perhitungan anggaran yang berpengaruh pada pengeluaran pembiayaan daerah menjadi naik.

Dilihat dari kontribusinya, belanja tak langsung memiliki kontribusi terbesar dalam pengeluaran daerah, walaupun pada tahun 2009 terjadi penurunan dari tahun 2008 yaitu sebesar 47,64 persen pada tahun 2008 menjadi 41,78 persen pada tahun 2009, namun pada tahun 2010 kembali naik menjadi 46,99 persen, ini berarti *share* belanja tak langsung mengalami fluktuatif pada dua tahun terakhir jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan kontribusi belanja langsung pada tahun 2009 dan 2010 mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2008 sebesar 49,29 persen menjadi 41,76 persen pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 menjadi 36,73 persen. Persentase realisasi belanja baik langsung maupun tidak langsung selalu lebih kecil dibandingkan anggarannya karena naiknya kontribusi pembiayaan dalam realisasinya.

Tabel c
Distribusi Persentase Realisasi Pengeluaran
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se Provinsi Banten
Menurut Jenis Pengeluaran
2008 - 2010

Jenis Pengeluaran	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)
PENGELUARAN	100.00	100.00	100.00
Belanja Tidak Langsung	47.64	41.78	46.99
1 Belanja Pegawai	40.28	36.28	40.41
2 Belanja Bunga	0.53	0.25	0.04
3 Belanja Subsidi	-	0.04	0.05
4 Belanja Hibah	1.08	2.15	3.38
5 Belanja Bantuan Sosial	3.33	2.06	1.10
6 Belanja Bagi Hasil	0.46	-	0.17
7 Belanja Bantuan Keuangan	1.74	0.88	0.87
8 Pengeluaran Tidak Terduga	0.23	0.13	0.98
Belanja Langsung	49.29	41.76	36.73
1 Belanja Pegawai	10.50	7.89	6.88
2 Belanja Barang dan Jasa	15.92	13.81	13.71
3 Belanja Modal	22.87	20.06	16.14
Pembiayaan Daerah	3.07	16.45	16.28

II.3.1. Belanja Tak Langsung

Dari sisi belanja tak langsung, terlihat bahwa distribusi persentase belanja pegawai menyumbangkan peranan yang paling besar terhadap total pengeluaran daerah yaitu sebesar 36,28 persen pada tahun 2009 dan mengalami kenaikan 15,71 persen dibandingkan tahun 2008, dengan nominal sebesar 2.466,13 miliar rupiah pada tahun 2008 menjadi 2.853,64 miliar rupiah pada tahun 2009, dan tahun 2010 naik 33,04 persen dari tahun 2009 dengan nominal sebesar 3.796,42 miliar rupiah. Sedangkan kontribusi terbesar pada tahun 2009 setelah belanja pegawai berturut-turut adalah belanja hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan masing-masing sebesar 2,15 persen, 2,06 persen, dan 0,88 persen. Sementara kontribusi terbesar pada tahun 2010 setelah belanja pegawai berturut-turut adalah belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan pengeluaran tak terduga masing-masing sebesar 3,38 persen, 1,10 persen dan 0,98 persen. Pada tahun 2008

urutannya sedikit berbeda yaitu belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan belanja hibah masing-masing sebesar 3,33 persen, 1,74 persen, dan 1,08 persen.

II.3.2. Belanja Langsung

Berbeda dengan belanja tak langsung, pada belanja langsung terlihat bahwa distribusi persentase belanja modal menyumbangkan peranan yang paling besar terhadap total pengeluaran daerah yaitu sebesar 20,06 persen pada tahun 2009 dan 16,14 persen pada tahun 2010, dengan nilai nominal sebesar 1.400,34 miliar rupiah pada tahun 2008 menjadi 1.578,09 miliar rupiah pada tahun 2009 yang berarti naik 12,69 persen, Sementara tahun 2010 turun -3,95 persen dari tahun 2009 dengan nominal 1.515,80 miliar rupiah. Sedangkan kontribusi terbesar setelah belanja modal berturut-turut adalah belanja barang dan jasa serta belanja pegawai masing-masing 13,81 persen dan 7,89 persen pada tahun 2009, dan tahun 2010 masing-masing sebesar 13,71 persen dan 6,88 persen. Jika diperhatikan angka nominalnya, hampir seluruh jenis belanja pelayanan publik juga mengalami kenaikan, kecuali belanja modal tahun 2010 mengalami penurunan dibanding tahun 2009.

II.3.3. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan daerah bersumber dari transfer ke dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran utang pokok yang jatuh tempo, dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. Pengeluaran pembiayaan daerah pada 2009 mengalami kenaikan yaitu sebesar 187,81 miliar rupiah pada realisasi tahun 2008 menjadi 1.294,07 miliar rupiah pada tahun 2009 atau naik sebesar 589,03 persen, dan tahun 2010 menjadi 1.529,65 miliar rupiah atau naik 18,20 persen dari tahun 2009.

II.4. Kesimpulan

Laju pertumbuhan realisasi penerimaan pemerintah daerah kabupaten/kota bukan hanya semata-mata disebabkan oleh laju pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD). Namun demikian pemerintah daerah tetap berusaha lebih menekankan komponen PAD dibandingkan komponen lainnya untuk lebih memperkuat kemandirian pemerintah daerah tersebut dalam memacu pertumbuhan pendapatan daerah. Kontribusi terbesar dari struktur penerimaan daerah adalah pendapatan yang berasal dari dana perimbangan, khususnya dari dana alokasi umum (DAU) yang digunakan untuk belanja langsung dan belanja tak langsung.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kecilnya kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah kabupaten/kota. *Pertama*, masih adanya sumber pendapatan potensial yang dapat digali oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, tetapi berada di luar wewenang pemerintah daerah tersebut. *Kedua*, BUMD pada umumnya belum beroperasi secara optimal, hal ini tercermin dari laba bersih yang dihasilkan jika dilihat dari struktur biaya, asset dan penjualannya. *Ketiga*, rendahnya tingkat hidup dan ekonomi masyarakat, tercermin dari pendapatan perkapita. *Keempat*, kurang mampunya pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang ada.

Pada realisasi tahun 2009 dan 2010 peranan belanja daerah didominasi oleh belanja tak langsung dimana belanja tak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program. Dalam struktur pengeluaran daerah, belanja tak langsung menyumbangkan peranan yang lebih tinggi dibandingkan dengan peranan belanja langsung dengan kontribusi 41,78 persen pada tahun 2009 dan 46,99 persen pada tahun 2010, mengalami penurunan dibanding kontribusi tahun 2008 sebesar 47,64 persen.

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tahun anggaran 2008 – 2010 diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen data akan data statistik keuangan daerah. Publikasi ini merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.

Data yang disajikan dalam publikasi ini memuat data realisasi pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota tahun 2008, 2009, dan 2010. Data tersebut merupakan hasil kompilasi data yang diterima dari Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui BPS daerah.

Dalam publikasi ini disertakan pula penjelasan tentang konsep definisi dan metode pengumpulan data guna mempermudah pemahaman para pengguna data. Semoga publikasi ini dapat memenuhi kebutuhan para konsumen data, baik untuk keperluan perencanaan dan analisis maupun evaluasi perkembangan perekonomian secara umum.

Kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan guna penyempurnaan dan pengembangan publikasi yang akan datang.

Serang, November 2011

Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Banten,

Ir. Nanan Sunandi, M.Sc.
NIP. 19530801197503 1 002

**STATISTIK KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROVINSI BANTEN
2008 – 2010**

No, Publikasi : 36540.1109
Katalog BPS : 7203002.36

Naskah
Bidang Statistik Distribusi

Gambar Kulit
Bidang Statistik Distribusi

Diterbitkan oleh
Badan Pusat Statistik Provinsi Banten

“Boleh mengutip dengan menyebut sumbernya”

**STATISTIK KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROVINSI BANTEN 2008 – 2010**

Anggota Tim Penyusun :

Koordinator : Ir. Indra Warman

Editor : Suwandari, S.ST

Penulis/Pengolah Data : Mabrur Ams.

<http://banten.bps.go.id>

TABEL
TABLE 2.1

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
ACTUAL OF REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENT RECEIPT
PROVINSI BANTEN
2008 - 2010
(ribu rupiah / thousand rupiahs)

Jenis Penerimaan <i>Receipt items</i>		2008	2009	2010
(1)		(3)	(4)	(5)
A.	PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT RECEIPT	5.711.351.202	6.756.714.313	7.940.097.355
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Local Government Original Receipt</i>	753.901.856	950.804.139	1.129.058.864
1.1.	Pajak daerah <i>Local Taxes</i>	339.017.000	430.959.919	516.578.948
1.2.	Retribusi Daerah <i>Local Reimbursements</i>	219.528.658	228.151.765	274.390.431
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan <i>Output of Regional Government Corporate and Management of Separated Reg. Government Wealth</i>	32.938.586	47.556.421	74.929.828
1.4.	Lain-lain PAD yang sah <i>Other Local Government Original Receipt</i>	162.417.612	244.136.034	263.159.657
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	4.314.627.161	4.960.591.218	5.677.001.123
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	765.035.391	1.073.415.943	1.315.904.459
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	2.651.379	3.477.796	5.464.410
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	3.281.749.391	3.576.457.779	3.990.689.255
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	265.191.000	307.239.700	364.943.000
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Receipt</i>	642.822.185	845.318.956	1.134.037.368
B.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	411.608.033	1.109.343.478	1.453.802.388
JUMLAH / TOTAL		6.122.959.235	7.866.057.791	9.393.899.743

TABEL
TABLE 2.2

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
ACTUAL EXPENDITURE OF REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENT
PROVINSI BANTEN
2008 - 2010
(ribu rupiah / thousand rupiahs)

Jenis Pengeluaran <i>Expenditure items</i>		2008	2009	2010
(1)		(2)	(3)	(4)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE	2.917.172.096	3.286.770.753	4.413.996.187
1	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	2.466.129.271	2.853.639.096	3.796.418.021
2	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	32.616.601	20.036.624	3.399.026
3	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	-	2.832.222	4.365.060
4	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	66.037.000	169.365.870	317.479.496
5	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	204.188.224	161.668.756	102.941.336
6	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	28.000.000	-	16.234.721
7	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	106.311.000	69.367.373	81.334.175
8	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	13.890.000	9.860.812	91.824.352
B.	BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE	3.017.975.747	3.285.213.689	3.450.252.873
1	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	642.715.758	620.922.048	646.581.676
2	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	974.920.488	1.086.205.464	1.287.866.479
3	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	1.400.339.501	1.578.086.177	1.515.804.718
C.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	187.811.392	1.294.073.349	1.529.650.683
JUMLAH / TOTAL		6.122.959.235	7.866.057.791	9.393.899.743

TABEL 2.1.1
TABLE

**REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
ACTUAL OF REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENT RECEIPT
PROVINSI BANTEN
2008 - 2010**

(ribu rupiah / thousand rupiahs)

Kabupaten/Regency : Pandeglang

Jenis Penerimaan <i>Receipt items</i>		2008	2009	2010
(1)		(3)	(4)	(5)
A.	PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT RECEIPT	775.122.000	821.800.000	936.179.510
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Local Government Original Receipt</i>	55.429.000	31.921.009	31.804.338
1.1.	Pajak daerah <i>Local Taxes</i>	5.337.000	4.649.629	4.598.186
1.2.	Retribusi Daerah <i>Local Retributions</i>	29.931.000	18.024.364	16.988.397
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan <i>Output of Regional Government Corporate and Management of Separated Reg. Government Wealth</i>	4.502.000	6.548.523	8.051.817
1.4.	Lain-lain PAD yang sah <i>Other Local Government Original Receipt</i>	15.659.000	2.698.493	2.165.938
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	682.502.000	737.819.452	832.302.075
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	39.969.766	39.990.197	46.133.885
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	759.234	1.200.707	1.740.132
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	580.210.000	618.789.548	695.077.859
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	61.563.000	77.839.000	89.350.200
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Receipt</i>	37.191.000	52.059.539	72.073.096
B.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	17.984.000	9.852.824	38.245.813
JUMLAH / TOTAL		793.106.000	831.652.824	974.425.323

TABEL
TABLE 2.2.1

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
ACTUAL EXPENDITURE OF REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENT
PROVINSI BANTEN
2008 - 2010

(ribu rupiah / thousand rupiahs)

Kabupaten/Regency : Pandeglang

Jenis Pengeluaran <i>Expenditure items</i>		2008	2009	2010
(1)		(2)	(3)	(4)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE	515.319.000	520.737.133	766.633.577
1	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	424.438.000	431.826.991	694.126.852
2	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	15.779.000	17.111.786	-
3	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	-	-	-
4	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	5.150.000	35.047.780	67.608.499
5	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	39.963.000	36.651.603	1.520.470
6	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	-	-	3.138.881
7	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	28.989.000	-	-
8	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	1.000.000	98.973	238.875
B.	BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE	210.787.000	205.832.032	166.244.842
1	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	35.119.000	46.750.604	-
2	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	89.211.000	79.054.634	91.043.624
3	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	86.457.000	80.026.794	75.201.217
C.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	67.000.000	105.083.659	41.546.904
JUMLAH / TOTAL		793.106.000	831.652.824	974.425.323

TABEL 2.1.2
TABLE

**REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
ACTUAL OF REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENT RECEIPT
PROVINSI BANTEN
2008 - 2010**

(ribu rupiah / thousand rupiahs)

Kabupaten/Regency : Lebak

Jenis Penerimaan <i>Receipt items</i>		2008	2009	2010
(1)		(3)	(4)	(5)
A.	PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT RECEIPT	836.455.000	823.094.133	955.533.629
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Local Government Original Receipt</i>	93.329.000	58.026.745	64.752.566
1.1.	Pajak daerah <i>Local Taxes</i>	5.809.000	7.111.017	6.527.234
1.2.	Retribusi Daerah <i>Local Retributions</i>	27.376.000	38.139.321	46.422.446
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan <i>Output of Regional Government Corporate and Management of Separated Reg. Government Wealth</i>	1.605.000	2.277.987	2.756.944
1.4.	Lain-lain PAD yang sah <i>Other Local Government Original Receipt</i>	58.539.000	10.498.420	9.045.942
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	661.836.000	688.615.575	801.068.805
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	40.833.359	43.773.366	53.621.082
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	719.641	585.685	666.791
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	554.305.000	576.180.524	655.633.732
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	65.978.000	68.076.000	91.147.200
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Receipt</i>	81.290.000	76.451.813	89.712.258
B.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	49.641.000	69.966.215	47.327.050
JUMLAH / TOTAL		886.096.000	893.060.348	1.002.860.679

TABEL 2.2.2
TABLE

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
ACTUAL EXPENDITURE OF REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENT
PROVINSI BANTEN
2008 - 2010

(ribu rupiah / thousand rupiahs)

Kabupaten/Regency : Lebak

Jenis Pengeluaran <i>Expenditure items</i>		2008	2009	2010
(1)		(2)	(3)	(4)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE	415.781.000	449.387.833	583.105.119
1	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	364.045.000	423 418 026	537.250.685
2	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	4.800.000	2 012	3.267.361
3	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	-	0	-
4	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	19.117.000	14 786 500	17.117.475
5	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	14.550.000	10 688 229	10.597.757
6	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	12.000.000	-	13.095.840
7	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	-	-	1.066.251
8	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	1.269.000	493 066	709.750
B.	BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE	441.160.000	381.655.477	311.197.231
1	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	42.574.000	44 492 044	26.620.496
2	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	101.112.000	104 264 169	115.129.609
3	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	297.474.000	232 899 264	169.447.126
C.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	29.155.000	62 017 038	108.558.329
JUMLAH / TOTAL		886.096.000	893.060.348	1.002.860.679

TABEL 2.1.3
TABLE

**REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
ACTUAL OF REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENT RECEIPT
PROVINSI BANTEN
2008 - 2010**

(ribu rupiah / thousand rupiahs)

Kabupaten/Regency : Tangerang

Jenis Penerimaan <i>Receipt items</i>		2008	2009	2010
(1)		(3)	(4)	(5)
A.	PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT RECEIPT	1.593.537.991	1.922.811.228	1.638.706.185
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Local Government Original Receipt</i>	252.427.000	372.841.974	354.765.483
1.1.	Pajak daerah <i>Local Taxes</i>	119.127.000	150.231.263	117.198.221
1.2.	Retribusi Daerah <i>Local Retributions</i>	52.300.000	61.523.494	54.709.901
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan <i>Output of Regional Government Corporate and Management of Separated Reg. Government Wealth</i>	9.600.000	14.722.143	24.445.104
1.4.	Lain-lain PAD yang sah <i>Other Local Government Original Receipt</i>	71.400.000	146.365.074	158.412.257
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	1.103.510.991	1.376.748.938	1.106.703.700
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	274.000.000	471.415.705	321.056.257
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	-	348.446	549.297
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	774.453.991	855.219.787	714.568.246
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	55.057.000	49.765.000	70.529.900
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Receipt</i>	237.600.000	173.220.316	177.237.002
B.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	79.250.000	570.821.392	807.406.806
JUMLAH / TOTAL		1.672.787.991	2.493.632.620	2.446.112.991

TABEL 2.2.3
TABLE

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
ACTUAL EXPENDITURE OF REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENT
PROVINSI BANTEN
2008 - 2010
(ribu rupiah / thousand rupiahs)

Kabupaten/Regency : Tangerang

Jenis Pengeluaran <i>Expenditure items</i>		2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE	748.176.461	859.815.480	840.369.171
1	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	638.092.461	692.728.244	676.701.230
2	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	3.000.000	-	-
3	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	-	-	-
4	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	13.490.000	93.706.500	102.402.120
5	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	47.594.000	34.849.472	23.355.197
6	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	16.000.000	-	-
7	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	25.000.000	34.460.410	34.906.951
8	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	5.000.000	4.070.854	3.003.674
B.	BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE	885.802.430	1.155.409.217	943.139.598
1	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	185.045.036	160.975.585	137.772.258
2	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	332.476.941	353.580.541	338.069.358
3	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	368.280.453	640.853.091	467.297.982
C.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	38.809.100	478.407.923	662.604.222
JUMLAH / TOTAL		1.672.787.991	2.493.632.620	2.446.112.991

TABEL 2.1.4
TABLE

**REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
ACTUAL OF REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENT RECEIPT
PROVINSI BANTEN
2008 - 2010**

(ribu rupiah / thousand rupiahs)

Kabupaten/Regency : Serang

Jenis Penerimaan <i>Receipt items</i>		2008	2009	2010
(1)		(3)	(4)	(5)
A.	PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT RECEIPT	998.362.000	909.124.649	949.389.989
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Local Government Original Receipt</i>	122.987.000	118.585.763	138.817.369
1.1.	Pajak daerah <i>Local Taxes</i>	37.033.000	37.560.372	41.649.819
1.2.	Retribusi Daerah <i>Local Retributions</i>	71.296.000	56.705.379	67.256.628
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan <i>Output of Regional Government Corporate and Management of Separated Reg. Government Wealth</i>	5.324.000	9.010.470	14.903.193
1.4.	Lain-lain PAD yang sah <i>Other Local Government Original Receipt</i>	9.334.000	15.309.542	15.007.729
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	807.647.000	726.108.534	749.912.485
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	73.564.043	69.992.716	88.123.678
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	477.957	429.408	649.078
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	675.627.000	582.554.410	612.446.029
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	57.978.000	73.132.000	48.693.700
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Receipt</i>	67.728.000	64.430.352	60.660.135
B.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	49.999.000	144.093.847	165.037.036
JUMLAH / TOTAL		1.048.361.000	1.053.218.496	1.114.427.025

TABEL 2.2.4
TABLE

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
ACTUAL EXPENDITURE OF REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENT
PROVINSI BANTEN
2008 - 2010
(ribu rupiah / thousand rupiahs)

Kabupaten/Regency : Serang

Jenis Pengeluaran <i>Expenditure items</i>		2008	2009	2010
(1)		(2)	(3)	(4)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE	596.591.000	528.316.111	639.659.825
1	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	472.491.000	454.515.649	561.286.911
2	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	-	-	-
3	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	-	-	-
4	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	6.000.000	1.631.730	25.507.414
5	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	62.853.000	39.442.687	20.627.272
6	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	-	-	-
7	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	51.247.000	28.490.361	26.738.237
8	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	4.000.000	4.235.684	5.499.991
B.	BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE	442.704.000	344.385.622	336.807.477
1	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	85.797.000	73.363.264	71.937.470
2	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	161.023.000	134.943.940	155.369.823
3	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	195.884.000	136.078.418	109.500.184
C.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	9.066.000	180.516.763	137.959.723
JUMLAH / TOTAL		1.048.361.000	1.053.218.496	1.114.427.025

TABEL
TABLE 2.1.5

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
ACTUAL OF REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENT RECEIPT
PROVINSI BANTEN
2008 - 2010

(ribu rupiah / thousand rupiahs)

Kota/Municipality : Tangerang

Jenis Penerimaan <i>Receipt items</i>		2008	2009	2010
(1)		(3)	(4)	(5)
A.	PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT RECEIPT	992.438.211	1.182.823.244	1.338.920.810
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Local Government Original Receipt</i>	136.639.856	193.575.745	230.634.138
1.1.	Pajak daerah <i>Local Taxes</i>	98.730.000	126.877.045	159.764.135
1.2.	Retribusi Daerah <i>Local Retributions</i>	25.687.658	26.381.133	30.180.376
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan <i>Output of Regional Government Corporate and Management of Separated Reg. Government Wealth</i>	9.643.586	10.762.271	13.663.132
1.4.	Lain-lain PAD yang sah <i>Other Local Government Original Receipt</i>	2.578.612	29.555.296	27.026.495
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	701.900.170	793.362.376	823.213.829
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	248.699.830	293.471.513	326.163.762
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	539.940	304.393	518.187
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	445.217.400	496.637.770	488.979.280
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	7.443.000	2.948.700	7.552.600
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Receipt</i>	153.898.185	195.885.123	285.072.843
B.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	93.017.033	308.687.013	366.717.825
JUMLAH / TOTAL		1.085.455.244	1.491.510.257	1.705.638.635

TABEL 2.2.5
TABLE

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
ACTUAL EXPENDITURE OF REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENT
PROVINSI BANTEN
2008 - 2010
(ribu rupiah / thousand rupiahs)

Kota/Municipality : Tangerang

Jenis Pengeluaran <i>Expenditure items</i>		2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE	404.597.635	446.262.118	598.697.932
1	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	360.056.810	426.237.551	487.339.238
2	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	1.537.601	1.739.217	-
3	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	-	-	-
4	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	16.000.000	2.467.414	11.522.830
5	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	26.003.224	15.817.936	17.916.125
6	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	-	-	-
7	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	-	-	954.550
8	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	1.000.000	-	80.965.189
B.	BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE	670.599.317	657.343.719	797.035.904
1	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	226.966.722	200.322.080	254.739.741
2	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	168.264.547	177.063.734	228.843.052
3	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	275.368.048	279.957.905	313.453.111
C.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	10.258.292	387.904.420	309.904.799
JUMLAH / TOTAL		1.085.455.244	1.491.510.257	1.705.638.635

TABEL 2.1.6
TABLE

**REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
ACTUAL OF REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENT RECEIPT
PROVINSI BANTEN
2008 - 2010**

(ribu rupiah / thousand rupiahs)

Kota/Municipality : Cilegon

Jenis Penerimaan <i>Receipt items</i>		2008	2009	2010
(1)		(3)	(4)	(5)
A.	PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT RECEIPT	515.436.000	640.262.586	685.599.453
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Local Government Original Receipt</i>	93.090.000	135.537.940	150.249.202
1.1.	Pajak daerah <i>Local Taxes</i>	72.981.000	82.328.146	84.928.181
1.2.	Retribusi Daerah <i>Local Retributions</i>	12.938.000	13.678.520	12.971.227
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan <i>Output of Regional Government Corporate and Management of Separated Reg. Government Wealth</i>	2.264.000	4.235.027	11.109.638
1.4.	Lain-lain PAD yang sah <i>Other Local Government Original Receipt</i>	4.907.000	35.296.247	41.240.156
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	357.231.000	438.140.629	424.673.141
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	87.968.393	115.444.396	145.151.711
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	154.607	348.446	393.745
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	251.936.000	295.333.787	279.127.685
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	17.172.000	27.014.000	-
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Receipt</i>	65.115.000	66.584.017	110.677.110
B.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	121.717.000	2.603.017	15.711.300
JUMLAH / TOTAL		637.153.000	642.865.603	701.310.753

TABEL 2.2.6
TABLE

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
ACTUAL EXPENDITURE OF REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENT
PROVINSI BANTEN
2008 - 2010

(ribu rupiah / thousand rupiahs)

Kota/Municipality : Cilegon

Jenis Pengeluaran <i>Expenditure items</i>		2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE	236.707.000	256.296.735	352.976.185
1	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	207.006.000	219.743.065	291.854.771
2	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	7.500.000	1.183.609	131.665
3	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	-	2.832.222	4.365.060
4	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	6.280.000	12.197.599	35.124.120
5	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	13.225.000	17.228.485	17.943.695
6	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	-	-	-
7	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	1.075.000	2.149.520	2.150.000
8	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	1.621.000	962.235	1.406.874
B.	BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE	366.923.000	354.581.696	320.901.080
1	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	67.214.000	65.441.505	60.001.382
2	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	122.833.000	142.959.673	136.813.359
3	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	176.876.000	146.180.518	124.086.339
C.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	33.523.000	31.987.172	27.433.488
JUMLAH / TOTAL		637.153.000	642.865.603	701.310.753

TABEL 2.1.7
TABLE

**REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
ACTUAL OF REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENT RECEIPT
PROVINSI BANTEN
2008 - 2010
(ribu rupiah / thousand rupiahs)**

Kota/Municipality : Serang

Jenis Penerimaan <i>Receipt items</i>		2008	2009	2010
(1)	(3)	(4)	(5)	
A.	PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT RECEIPT	-	265.004.058	517.574.294
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Local Government Original Receipt</i>	-	17.923.437	26.535.747
1.1.	Pajak daerah <i>Local Taxes</i>		10.253.842	11.929.940
1.2.	Retribusi Daerah <i>Local Retributions</i>		4.751.225	10.006.786
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan <i>Output of Regional Government Corporate and Management of Separated Reg. Government Wealth</i>	-	-	-
1.4.	Lain-lain PAD yang sah <i>Other Local Government Original Receipt</i>		2.918.370	4.599.021
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	-	199.795.714	403.362.709
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>		39.328.050	40.978.959
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>		260.711	657.008
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>		151.741.953	315.997.942
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>		8.465.000	45.728.800
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Receipt</i>		47.284.907	87.675.838
B.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		3.319.170	13.356.559
JUMLAH / TOTAL		-	268.323.228	530.930.852

TABEL 2.2.7
TABLE

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
ACTUAL EXPENDITURE OF REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENT
PROVINSI BANTEN
2008 - 2010
(ribu rupiah / thousand rupiahs)

Kota/Municipality : Serang

Jenis Pengeluaran <i>Expenditure items</i>		2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE	-	183.160.236	279.899.850
1	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		174.604.570	263.270.284
2	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>		-	-
3	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>		-	-
4	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>		120.000	3.787.000
5	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>		4.168.584	6.198.575
6	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>		-	-
7	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>		4.267.082	6.643.992
8	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>		-	-
B.	BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE	-	71.806.434	200.533.245
1	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		14.378.324	29.633.380
2	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>		38.111.377	87.931.054
3	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>		19.316.733	82.968.811
C.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		13.356.558	50.497.757
JUMLAH / TOTAL		-	268.323.228	530.930.852

TABEL 2.1.8
TABLE

**REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
ACTUAL OF REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENT RECEIPT
PROVINSI BANTEN
2008 - 2010**

(ribu rupiah / thousand rupiahs)

Kota/Municipality : Tangerang Selatan

Jenis Penerimaan <i>Receipt items</i>		2008	2009	2010
(1)	(3)	(4)	(5)	
A.	PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT RECEIPT	-	191.794.415	918.193.485
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Local Government Original Receipt</i>	-	22.391.526	131.500.021
1.1.	Pajak daerah <i>Local Taxes</i>		11.948.605	89.983.231
1.2.	Retribusi Daerah <i>Local Retributions</i>		8.948.329	35.854.671
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan <i>Output of Regional Government Corporate and Management of Separated Reg. Government Wealth</i>	-	-	-
1.4.	Lain-lain PAD yang sah <i>Other Local Government Original Receipt</i>		1.494.592	5.662.119
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	-	-	535.764.379
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>		-	294.675.126
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>		-	290.171
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>		-	228.858.482
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>		-	11.940.600
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Receipt</i>		169.402.889	250.929.085
B.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		-	-
JUMLAH / TOTAL		-	191.794.415	918.193.485

TABEL 2.2.8
TABLE

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
ACTUAL EXPENDITURE OF REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENT
PROVINSI BANTEN
2008 - 2010
(ribu rupiah / thousand rupiahs)

Kota/Municipality : Tangerang Selatan

Jenis Pengeluaran <i>Expenditure items</i>		2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE	-	42.795.107	352.654.528
1	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		30.565.000	284.588.051
2	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>		-	-
3	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>		-	-
4	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>		9.408.347	54.410.038
5	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>		2.821.760	4.782.245
6	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>		-	-
7	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>		-	8.874.194
8	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>		-	-
B.	BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE	-	114.199.492	374.393.496
1	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		15.198.642	65.876.949
2	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>		56.227.396	134.666.600
3	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>		42.773.454	173.849.947
C.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		34.799.816	191.145.461
JUMLAH / TOTAL		-	191.794.415	918.193.485

